

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu perubahan iklim adalah suatu permasalahan lingkungan yang sangat mendesak yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Mulai dari perubahan cuaca ekstrim hingga ancaman ketahanan pangan dan perubahan iklim global yang mengkhawatirkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan seiring pertumbuhan ekonomi disertai pertambahan populasi, demikian juga aktivitas sehari-hari yang mempengaruhi tingkat kumulatif emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan naiknya suhu bumi (Mehmood, 2020). Secara nyata, perubahan iklim memberikan dampak yang luar biasa untuk makhluk hidup dan kondisi bumi kedepannya. Perubahan iklim dapat membawa efek kumulatif untuk setiap masalah lingkungan karena menjadi masalah bagi berbagai sektor yang mencakup banyak aspek kehidupan di dalamnya, antara lain kesehatan, pertanian, kehutanan, infrastruktur, pariwisata, energi dan sosial. Atas dampak tersebut, terdapat banyak negara yang rentan terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan iklim (Bappenas, 2021). Jika banyak negara masih melanggengkan skema pembangunan saat ini, maka suhu rata-rata bumi akan naik ke tingkat yang sangat membahayakan. Efek dari perubahan iklim tidak dapat dikaitkan kepada negara tertentu yang menyebabkan emisi gas rumah kaca, sehingga semua negara menjadi penyebab dan korban di saat yang bersamaan (Mariani, 2021).

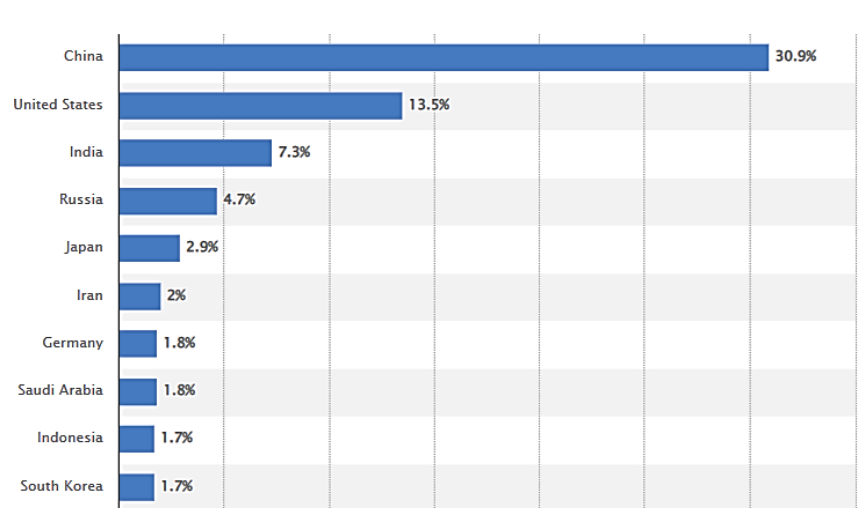
Perubahan iklim dan isu lingkungan telah dibahas dalam berbagai kacamata disiplin ilmu termasuk Ilmu Hubungan Internasional. Isu perubahan iklim merupakan isu modern yang hadir dalam ilmu hubungan internasional dan menjadi isu penting selain isu keamanan dan ekonomi. Faktor lingkungan dalam politik internasional menjadi sebuah kesatuan dalam segala lini kehidupan yang menunjang aktivitas manusia (Porter dan Brown, 1996). Krisis iklim menimbulkan ancaman yang serius bagi manusia, negara, hingga mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup

saat ini dan yang akan datang. Tantangan isu perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, melainkan harus diselesaikan bersama dengan upaya kolektif dengan bekerja sama melalui perjanjian, kooperasi, dan kolaborasi. Sehingga upaya-upaya untuk membentuk rencana pencegahan dan penanganan mulai dipertimbangkan oleh masyarakat global (Hapsari, 2021). Masalah lingkungan mendapat perhatian serius dari PBB dengan membentuk The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah forum untuk memantau dan memeriksa peningkatan Gas Rumah Kaca dan perubahan iklim global. Harus diakui bahwa perubahan iklim adalah nyata dan aktivitas manusia adalah penyebab utama. Sementara upaya untuk mengatasi perubahan iklim, juga akan mempengaruhi agenda pembangunan global yang mana keterkaitan antara perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan sangat kuat. Urgensi atas permasalahan perubahan iklim semakin meningkat, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil atau dikenal sebagai KTT Bumi. Pembahasan tentang penanganan perubahan iklim mendapatkan respon yang sangat baik dari banyak negara sehingga menghasilkan sebuah konvensi yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (Jackson, 2007).

PBB telah menunjukkan perannya dalam membawa isu yang membutuhkan tindakan global menjadi perhatian internasional. Upaya untuk menjadikan masalah perubahan iklim sebagai fokus utama agenda internasional terus berlanjut. Terlihat dengan diadopsinya Protocol Kyoto pada tahun 1997 dan diperkuat dengan Persetujuan Paris atau yang juga dikenal dengan Paris Agreement. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang momental dalam mengatasi isu perubahan iklim. Komitmen masing-masing negara dinyatakan melalui Nationally Determinant Contribution (NDC) periode 2020-2030. Sampai saat ini terhitung 194 dari 198 negara yang meratifikasi kerangka konvensi UNFCCC telah menyetujui Perjanjian Paris (UN Climate Change, 2021). Negara-negara anggota konvensi kembali menyatakan komitmen mereka untuk melindungi bumi dari degradasi lingkungan dalam Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda tersebut turut mengkhawatirkan

dampak buruk yang dapat menghambat kemampuan semua negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus isu perubahan iklim termasuk pada SDG 13 yang perfokus pada integrasi mitigasi dan adaptasi ke dalam kebijakan nasional. SDG 13 juga menyerukan implementasi komitmen yang dilakukan di UNFCCC dan untuk mempromosikan mekanisme yang mampu meningkatkan kapasitas perencanaan serta pengelolaan tentang perubahan iklim yang efektif (UN, 2020).

Indonesia sebagai negara di daerah tropis yang dan sebagai negara kepulauan tentu rentan atas efek perubahan iklim dan tentu berdampak pada proses pembangunan yang dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan pembangunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen dalam Perjanjian Paris untuk menekan kenaikan suhu rata-rata dibawah 2°C. Dalam target ini, Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup strategis di panggung internasional dalam upaya mendorong negara lain untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim global. Ambisi tersebut juga tidak lain atas dasar bahwa Indonesia menja di salah satu penghasil Gas Rumah Kaca terbesar di dunia, maka dari itu, dengan mengambil langkah besar Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.



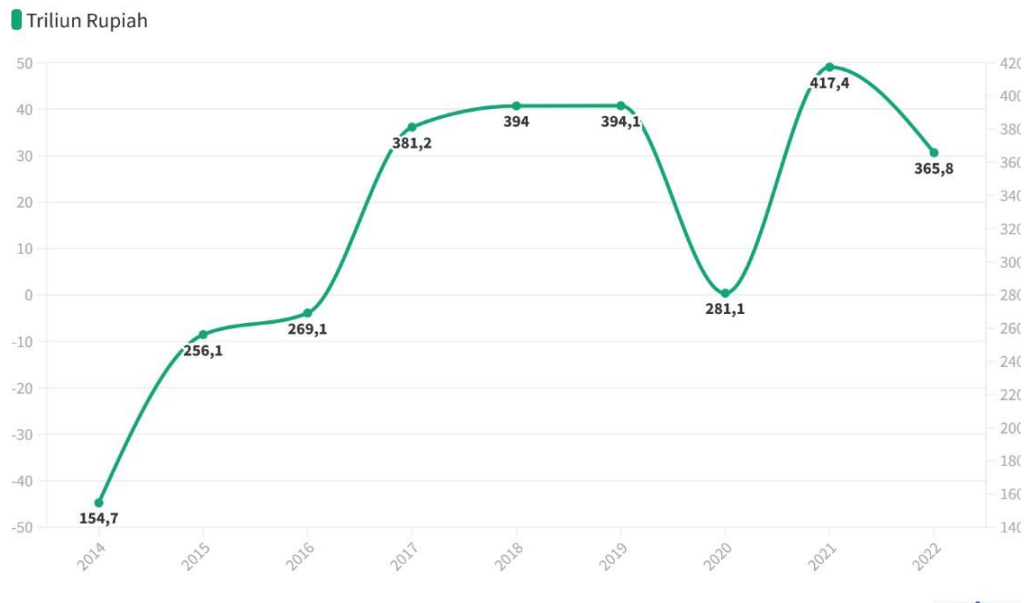
Gambar 1.1 Sepuluh Negara dengan Emisi Gas Rumah Kaca Teratas tahun 2021

Sumber: Statista, 2022

Menjadi negara penghasil gas rumah kaca terbesar kedelapan di dunia, percepatan aksi iklim sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dan menyelamatkan lingkungan dari ancaman perubahan iklim. Dilihat dari grafik 1.1 Indonesia menjadi salah satu negara yang merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar. Hal tersebut menjadikan Indonesia berperan penting yaitu sebagai kontributor sekaligus negara yang terancam akan perubahan iklim saat ini. Aksi iklim Indonesia yang lebih serius tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di ranah internasional (Statista, 2022).

Target Indonesia dalam pemenuhan aksi iklim mendapat perhatian mengingat pada awal kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden, telah menyiratkan bahwa akan adanya pergeseran fokus kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pendapat ini didasarkan pada beberapa kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia dinilai memiliki karakter internasionalis sedangkan pemerintahan saat ini terdapat kecenderungan berfokus pada urusan dalam negeri yang dimaksudkan untuk memperkuat di mulai dari dalam, sehingga pemerintah mengutamakan kepentingan domestik yang memprioritaskan isu sosial ekonomi (Widiatmaja dan Albab, 2019). Penggunaan *domestic-centric* pada dasarnya memiliki makna yang merujuk bahwa Indonesia selama pemerintahan Jokowi memiliki kecenderungan menjadikan kepentingan domestik sebagai dasar bagi keputusan Indonesia untuk terlibat dalam forum multilateral. Hal ini sejalan dengan prioritas kerja kepresidenan Jokowi baik di periode pertama dan kedua terlihat jalan keinginan kuat untuk meningkatkan perekonomian terlebih pada pembangunan infrastruktur. Hal ini digambarkan dalam visi Indonesia Maju yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo yang nyatanya menaruh perhatian pada lima bidang strategis, yaitu: infrastruktur; SDM; investasi seluas-luasnya; reformasi birokrasi; serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tepat sasaran (Menpan, 2019).

## Anggaran Infrastruktur di Indonesia Tahun 2014-2022



Gambar 1.2 Anggaran Infrastruktur di Indonesia tahun 2014-2022

Sumber: Goodstats, 2022

Dari gambar 1.2 berikut ini, terlihat jelas perbedaan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rentang waktu sembilan tahun terakhir. Peningkatan infrastruktur secara massif pada kepemimpinan Jokowi menandakan bahwa pemerintah sangat ambisius dalam pembangunan ekonomi yang dimulai dari dalam negeri.

Jika penulis melihat fenomena ini secara seksama, partisipasi pemerintah Indonesia terhadap rezim lingkungan global tampaknya hadir sebagai sebuah ‘anomali’ ditengah arah kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo yang cenderung berfokus pada isu-isu domestik. Jika melihat konteks politik luar negeri Indonesia kini mencerminkan “kebijakan luar negeri senantiasa dimulai dari rumah”. Anomali ini semakin menarik jika penulis mempertimbangkan fakta bahwa arah kebijakan Joko Widodo cenderung memarginalkan isu-isu non-tradisional seperti lingkungan hidup sementara isu-isu perekonomian dan investasi hadir sebagai garda terdepan prioritas Indonesia. Hal ini digambarkan dalam visi Indonesia Maju yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo yang nyatanya hanya

menaruh perhatian pada lima bidang strategis, yaitu: infrastruktur; SDM; investasi seluas-luasnya; reformasi birokrasi; serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tepat sasaran.

Berangkat dari masalah di atas terdapat hal yang perlu dieksplorasi terkait mengapa Indonesia menunjukkan peran dalam kanevas dan isu normatif internasional dan regional terlepas dari orientasi kebijakan luar negeri Jokowi yang cenderung bersifat *domestic-centric* dan fokusnya pada bidang ekonomi. Bagaimana Indonesia melakukan hal ini perlu dieksplorasi secara lebih mendalam. Berdasar latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul **Peran Diplomasi *Middle power* Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim Global di era Kepemimpinan Joko Widodo**. Guna menilik alasan dibalik diplomasi Indonesia sebagai negara *middle power*, tulisan ini akan memaparkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah menjadi komitmen nasional dan internasional. Tulisan ini juga akan memberikan manfaat untuk siapa saja yang ingin mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap faktor-faktor yang dapat melatarbelakangi sikap pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri untuk berpartisipasi pada pembangunan berkelanjutan dan isu perubahan iklim global. Terakhir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk para civitas akademis lainnya serta penulis selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian terkait topik ini di masa yang akan mendatang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut: “Mengapa Indonesia turut serta berperan sebagai kekuatan *middle power* dalam pencapaian pengendalian perubahan iklim global di tengah arah kebijakan yang *domestic-centric*?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk diplomasi serta kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam isu perubahan iklim global.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis diplomasi Indonesia sebagai negara *middle power* dalam menjalankan perannya di kancah internasional dalam penanganan permasalahan perubahan iklim global. Selain itu, untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai negara *middle power* di forum internasional.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini diantaranya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan mengenai konsep diplomasi *middle power* dalam studi hubungan internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan penilaian diplomasi Indonesia sebagai negara *middle power* khususnya dalam isu perubahan iklim global.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi pemerintah, pihak swasta yang terkait. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang diplomasi *middle power* Indonesia terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan sehingga menjadi referensi bagi peneliti lainnya maupun masyarakat pada umumnya.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Hubungan internasional kontemporer dewasa ini berfokus tidak hanya pada hubungan politik antar negara, tetapi juga pada hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, lembaga internasional, lingkungan, dan banyak disiplin ilmu lainnya. Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian adalah terkait kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, penyusunan skripsi ini menggunakan referensi dari jurnal dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat oleh penulis guna mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Studi terdahulu digunakan sebagai pembandingan dan rujukan dalam melakukan proses identifikasi dan analisis. Penelitian terdahulu yang digunakan yaitu dengan judul *Middle power Cooperation for Climate Change and Green Growth*. Siwon. P, 2015 menyatakan bahwa terdapat ruang bagi negara-negara *middle power* yang tergabung dalam MIKTA untuk memfasilitasi kesepakatan baru tentang perubahan iklim yang berlaku untuk semua pihak dengan memainkan peran menjembatani antara negara maju dan berkembang. Peran negara-negara kekuatan menengah dapat mencakup tiga agenda kerja sama.

Penelitian kedua yaitu *Norms for the Earth: Changing the Climate on "Climate Change"* oleh Mitchell dan Carpenter (2019). Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat faktor pendorong dari pemenuhan hak asasi manusia (*human security*) yang mampu merubah perhatian etika menjadi kemauan politik dengan mengubah wacana berbasis kepentingan menjadi yang berbasis etika. Dengan menggunakan *logic of appropriateness* sebagai kerangka berpikir, penulis menunjukkan bahwa agenda tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh negara *middle power* untuk mencari identitas dalam multilateral.

Penelitian dengan judul *Peran dan Tantangan Indonesia dalam Upaya Menghadapi Perubahan Iklim di Tingkat Global* oleh Bataranotti dan Adipratama, (2021) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berhasil menjalin kerja sama internasional dengan beberapa negara dan memperoleh kesepakatan investasi untuk beralih ke energi terbarukan. Namun, Indonesia menghadapi tantangan baik dari permasalahan pembangunan dalam negeri dan juga tekanan internasional.



Berdasarkan pada sejumlah studi pendahuluan yang terkait, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan kebaruan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari sejumlah penelitian terkini yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui belum ditemui penelitian yang mengeksplorasi terkait antara kebijakan luar negeri Indonesiadan partisipasi Indonesia dalam isu normatif internasional. Selanjutnya dalam penelitian ini memfokuskan pada diplomasi Indonesia terhadap isu perubahan iklim di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan pendekatan *middle power diplomacy* sebagai landasan teori penelitian.

### **1.5.1 Middle power Diplomacy**

Pada dasarnya, dalam hubungan internasional, istilah *power* memiliki arti sebagai kekuatan suatu negara serta sebagai sebuah kepercayaan kolektif negara dalam memandang dirinya sebagai suatu entitas. Berdasarkan perbedaan kapabilitas yang dimiliki antara strategi kebijakan luar negeri dan ruang lingkup kepentingan Nasional, negara-negara di dunia dibedakan menjadi negara besar (*great power*), negara menengah (*middle power*), serta negara kecil (*small power*) (Cooper, Higgot, & Nossal, 1994). Gagasan tentang *middle power* atau kekuatan menengah mulai berkembang lebih luas dalam hierarki dunia internasional sebagai negara yang tidak besar maupun tidak kecil dalam hal kapasitas serta pengaruh internasional. Status suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi kekuatan besar, menengah, dan kecil dalam sistem internasional ditentukan paling tidak oleh dua hal, yakni kapabilitas material dan orientasi kebijakan luar negerinya. Berdasarkan literatur klasik, determinan kekuatan suatu negara ditentukan oleh kekuatan yang mereka miliki dan kekuatan yang mereka jalankan. Terkait dengan determinan pertama, faktor kekuatan nasional seperti sumberdaya ekonomi dan militer adalah faktor yang paling menentukan. Sumber daya ekonomi umumnya diukur berdasarkan besar kecilnya catatan PDB negara tersebut, sedangkan sumber daya militer diukur berdasarkan anggaran pertahanan, jumlah personil, serta ketersediaan alutsista. Sementara itu, faktor kedua berkaitan dengan pengaruh suatu negara di kancah internasional yang berkorelasi dengan keterlibatan negara tersebut dalam menyikapi isu-isu global (Flemes, 2007).

Namun, dewasa ini faktor perilaku atau behavioral yang menyoroti kiprah

suatu negara dalam sistem internasional menjadi relevan untuk mendeskripsikan kekuatan negara *middle power* dibanding dengan kekuatan lainnya. Diskursus hubungan internasional saat ini lebih mengarah pada definisi kekuatan menengah berdasarkan peran yang dimainkan negara dalam politik internasional. Keohane mendefinisikan *middle power* sebagai negara yang tidak dapat bertindak sendiri secara efektif, tetapi memungkinkan dapat memberikan dampak sistemik di regional atau melalui lembaga internasional. Terkait pembahasan kekuatan negara, dikatakan bahwa kekuatan menengah dapat dikenali bukan hanya dari faktor material seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, melainkan posisinya dalam sistem internasional. Pola politik luar negeri yang digunakan oleh negara kekuatan menengah seperti ini sering disebut sebagai diplomasi kekuatan menengah (*middle power diplomacy*) (Keohane, 1969). Sebagaimana menteri luar negeri Australia, Gareth Evans, mendefinisikan diplomasi kekuatan menengah sebagai berikut:

Diplomasi kekuatan menengah secara singkat adalah diplomasi yang bisa dijalankan oleh negara yang tidak terlalu besar atau terlalu kuat, baik di kawasan maupun di dunia internasional yang lebih luas untuk mempengaruhi negara lain dengan menyadari adanya kewajiban internasional yang harus dilakukan apabila menginginkan dunia menjadi lebih aman, lebih bijaksana, adil dan sejahtera (yang akan berpengaruh terhadap kepentingannya sendiri), dan memiliki kredibilitas memadai untuk kewajiban tersebut (Evans, 2011).

Negara kekuatan menengah sesungguhnya tidak mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk merubah sistem internasional, mengingat sistem internasional selama ini dihegemoni oleh kekuatan besar. Hal ini disebabkan karena negara dengan kekuatan menengah mempunyai kapasitas yang terbatas untuk membiasakan diri dengan pergantian yang terjadi di dalam sistem internasional. Dalam keadaan seperti ini, negara kekuatan menengah berupaya untuk memiliki kedudukan dalam forum-forum internasional dengan maksud untuk memperluas kapasitas melalui kerja sama yang sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing negara. Negara kekuatan menengah akan memperoleh peningkatan stabilitas terhadap sistem internasional melalui kerja sama sehingga terbebas dari ancaman akibat

ketidakstabilan yang disebabkan oleh sistem tersebut (Jordaan, 2003). Sehingga pada perkembangannya, *middle power* merujuk pada karakteristik diplomasi suatu negara seperti *niche diplomacy*, membangun koalisi antar negara, dan *good international citizenship* (Robertson, 2017).

Adanya batasan yang dimiliki oleh kekuatan menengah mendorong konsep *middle power* oleh Holbraad menjadi lebih substansial. Pemikiran Holbraad terhadap posisi *middle power* tidak lain yakni berpandangan bahwa *middle power* mendapat tekanan atas situasi internasional yang selanjutnya akan dipengaruhi oleh signifikansi kekuatan besar yang mendominasi politik internasional. Pada situasi tersebut, negara kekuatan menengah memiliki posisi sebagai negara yang lebih lemah dari kekuatan besar dalam sistem tetapi secara lebih kuat dari kekuatan negara kecil (Holbraad, 1984). Hal tersebut menandai bahwa negara berkekuatan menengah memiliki posisi untuk berupaya menghindari tekanan dan mempergunakan kesempatan yang disediakan struktur internasional yang ada di saat yang bersamaan.

### **1.5.2 Middle power Berdasarkan Orientasi Kebijakan Luar Negeri**

Terdapat dua paradigma mengenai strategi dan orientasi kebijakan luar negeri, yaitu orientasi keluar (*outward looking*) dan orientasi ke dalam (*inward looking*). Kedua paradigma tersebut memiliki karakteristik yang bertolak belakang, *outward looking* akan menekankan keterlibatan aktif pada isu internasional, sedangkan *inward looking* akan menitik beratkan pada isu-isu domestik dan mengurangi keterlibatan dalam isu internasional. Teori klasik turut menjelaskan relasi antara strategi kebijakan luar negeri dengan ruang lingkup kepentingan nasional sehingga dapat menentukan status suatu negara digolongkan menjadi negara *great power*, *middle power*, atau *small power*. Negara yang tergolong pada *great power* tentunya memiliki kepentingan dengan ruang lingkup global sehingga cenderung *outward looking* dengan kebijakan internasionalis. Lain halnya dengan negara *middle power* memiliki ruang lingkup kepentingan di level regional menjadikan kebijakan '*middle way*' yakni menjembatani kepentingan internasionalis dan regional. Sedangkan *small power* akan mengutamakan pemenuhan negaranya dan memilih untuk memaksimalkan hubungan bilateral. Namun, munculnya

kekuatan baru (*new emerging powers*) membuktikan outward looking dan inward looking bukan menjadi penentu kekuatan sebuah negara, melainkan suatu referensi dalam menjalankan kebijakan luar negeri (Rosyidin, 2014).

Diplomasi kekuatan menengah dapat dipahami dari tipikal kebijakan luar negeri yang menggunakan aktivisme dimana negara turut aktif dalam hubungan internasional, namun tidak aktif dalam semua isu global. Kecenderungan kekuatan menengah untuk memusatkan aktivisme mereka di tingkat multilateral sering dikaitkan dengan inisiatif yang ditujukan untuk membangun koalisi dengan negara-negara yang memiliki pandangan sama (*like-minded*) atas suatu isu tertentu. Multilateralisme dipilih dengan anggapan bahwa lembaga-lembaga internasional sebagai forum yang paling tepat untuk negosiasi multilateral. Perilaku kekuatan menengah sering kali dipandu oleh *national interest* yang menyebabkan *middlepowermanship* dapat berfungsi sebagai strategi untuk mencapai status dan prestise moral dalam mengejar kepentingan tersebut. Oleh karena itu, *good international citizenship* dapat dipahami sebagai produk dari perilaku mengejar kepentingan nasional maupun '*status seeking*' (Neack, 2003). Pemanfaatan kekuatan jaringan atas membangun koalisi dengan negara yang memiliki kesamaan pandangan, memungkinkan kekuatan menengah untuk memproyeksikan pengaruh dalam sistem internasional yang semakin kompleks dan saling mempengaruhi satu dan lainnya (Gilboa, 2009).

Efstathopoulos mengidentifikasi konsep *middle power* dengan pendekatan behavioral melalui beberapa karakteristik yang mampu mempengaruhi strategi diplomatik suatu negara, sehingga mampu mengejar agenda kebijakan luar negeri tertentu maupun mewujudkan agenda kepentingan nasionalnya. Identifikasi karakteristik kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh negara *middle power*, diantaranya: (1) memproyeksikan *good international citizenship* sebagai dasar normatif kebijakan luar negeri; (2) aktivisme multilateral untuk menyelesaikan masalah global. Posisi *middle power* dalam pengambilan kebijakan luar negeri akan mengarah kepada kecenderungan membangun kerja sama melalui diplomasi multilateral yang hampir mutlak dilakukan. Pada hakikatnya, diplomasi multilateral merupakan kepanjangan tangan dari diplomasi bilateral yang bertujuan menjalin

kerja sama sehingga membentuk multilateralisme. Negara *middle power* akan mengambil posisi strategis dalam kebijakan luar negeri yang bersifat independen tanpa menghilangkan pengaruh *great power* di dalamnya. Melalui implementasi tersebut, negara *middle power* dapat saling bekerja sama untuk memengaruhi kebijakan luar negeri negara *great power* maupun agenda internasional lainnya; (3) Leadership in crisis management, yaitu kecenderungan negara *middle power* untuk mengambil inisiatif kepemimpinan dalam manajemen krisis untuk mengurangi ketidakstabilan dalam urusan global (Efsthopoulos, 2018).

Ketiga karakteristik kebijakan luar negeri *middle power* tersebut kemudian dikemas dengan strategi, antara lain: (1) Niche Diplomacy yang dapat diartikan sebagai tindakan diplomasi yang spesifik dalam suatu bidang tertentu. Wujud diplomasi seperti ini sesuai dengan kapabilitas negara *middle power* untuk meralisasikan tujuan global dengan spesifik (Alden dan Vieira, 2005); (2) *Intellectual and Entrepreneurial leadership*, yang dimaksud dalam strategi ini adalah bentuk kepemimpinan *middle power* yang mampu bertindak sebagai katalisator, fasilitator, dan *bridge builder*. Aktor kekuatan menengah sebagai *catalyst* atau katalisator yaitu dengan berperan dalam memicu timbulnya inisiatif dalam sebuah diplomasi. Kekuatan menengah juga akan bertindak sebagai *facilitator* atau fasilitator dalam beberapa aksi yang bersifat kolaboratif untuk isu global yang lebih spesifik. Karakteristik ini melibatkan proses perencanaan dan menetapkan capaian melalui pertemuan formatif. *Middle power* juga berperan sebagai *bridge builder* guna terciptanya langkah kolektif mewujudkan kepentingan bersama. Hal ini sekaligus menjadi ranah bagi *middle power* untuk memanfaatkan statusnya agar menjadi penyeimbang di antara kekuatan sehingga terwujud hubungan internasional yang lebih dinamis; (3) Membangun koalisi dengan negara yang memiliki pandangan sama (*like-minded*). Gagasan membangun koalisi dengan pihak yang memiliki pandangan yang sama didorong oleh pandangan *good international citizenship*. Tendensi *middle power* untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan atas dasar untuk menunjukkan koalisi yang lebih asertif, sehingga *small power* dan aktor lain akan bergabung dan membendung pengaruh *great power* (Efsthopoulos, 2018).

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### **1. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan tersebut menjadi komitmen global dan nasional yang diterjemahkan ke dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara (Salim, 1990).

#### **2. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim merupakan perubahan kondisi alam yang menjadi salah satu bentuk ancaman dalam isu keamanan lingkungan yang patut dikhawatirkan. Adapun dampak luas atas perubahan iklim mengancam sektor kehidupan manusia yang disebabkan oleh perubahan sistem iklim secara alami dan faktor eksternal yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (*anthropogenic*) seiring pertambahan populasi, ekonomi, dan standar kehidupan melalui proses pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara (IPCC, 2014).

### **1.6.2 Definisi Operasional**

#### **1. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yang penulis pergunakan di sini merupakan terjemahan dari "*sustainable development*" yang dicanangkan oleh PBB. Sasaran pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan berkelanjutan dalam wawasan lingkungan, sehingga hanya terbatas pada kontribusi pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang menyesuaikan kerangka kerja Paris Agreement sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Sejalan dengan Paris Agreement yang berdasar pada pendekatan *bottom-up*, yang berarti bahwa negara-negara bebas untuk menentukan target dan instrumen iklim mereka sendiri yang dinyatakan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), maka akan terlihat keseriusan pemerintah Indonesia.

## 2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dianggap serius dewasa ini karena sebagian besar sumber ilmiah menunjukkan bahwa perubahan iklim ada nyatanya dan berpotensi menjadi lebih buruk jika manusia tidak bergerak untuk menghindari keadaan dan situasi yang menyebabkan perubahan iklim semakin mengkhawatirkan. Dalam penelitian ini, perubahan iklim dianggap sebagai diskursus politik karena terdapat penyatuan ide-ide dan pandangan kelompok pemangku kepentingan dan merumuskan kerangka kerja tentang perubahan iklim. Indonesia memaknai isu perubahan iklim sebagai langkah strategis pemerintah untuk menunjukkan perannya dalam penanganan isu tersebut di kancan internasional. Urgensi untuk bertindak mencegah perubahan iklim dimulai dan ditopang oleh opini publik tentang keadaan dan fakta bahwa pemanasan global itu penting dan harus didiskusikan.

### 1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan memberikan implikasi bahwa tindakan yang diambil oleh Joko Widodo merupakan contoh empirik bahwa Indonesia bergerak dalam diplomasi *middle power* sehingga dapat mempertahankan posisi Indonesia atas isu normatif perubahan iklim global dengan tetap fokus pada penguatan sektor domestik.

### 1.8 Metode Penelitian

#### 1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian eksplanatif. eksplanatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan maupun perbedaan (Bungin, 2010). Dalam menjawab rumusan masalah ini penulis akan mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, serta menggunakan konsep *middle power* dalam hubungan internasional sebagai basis dan kerangka teoritis dari penelitian ini. Terakhir, melalui penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang pengambilan kebijakan luar negeri dengan menggunakan teori *middle power*.

### **1.8.2 Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas sering dipahami sebagai variabel stimulus ataupun *predictor*. Pengertian variabel independen merupakan suatu variabel yang akan mempengaruhi dan suatu penyebab adanya perubahan atau munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel Independen (X) dari penelitian ini yaitu diplomasi *middle power* dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **1.8.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen sebagai variabel terikat atau dapat disebut sebagai variabel output, konsekuen. Pengertian variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi atau merupakan akibat yang disebabkan karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2013). Variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah posisi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim global sebagai upaya implementasi pembangunan berkelanjutan.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian di antara lain menggunakan studi pustaka yang bersumber pada data sekunder. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, jurnal, skripsi, tesis, laman resmi badan Pemerintah, maupun situs media online namun tetap mengutamakan kredibilitas untuk kepentingan penelitian (Hadi, 1989). Seluruh data yang didapat penulis kemudian akan direduksi, disajikan serta kemudian menarik kesimpulan atas rumusan masalah menggunakan kerangka teori sebagai dasar analisis.

### **1.8.4 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian metode eksplanatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atas alasan sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan "mengapa" serta memberikan penjelasan penelitian kualitatif sebagai proses pemahaman atas kompleksitas interaksi yang terjadi (Sarwono, 2006). Sedangkan analisis kualitatif adalah teknik penelitian atas kecenderungannya untuk eksplorasi guna memperoleh pemahaman tentang alasan, opini, serta motivasi yang menjadi



dasar suatu perilaku (Wyse, 2011). Sehingga tipe penelitian ini sesuai untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel.

#### **1.8.5 Jangkauan Penelitian**

Ruang lingkupjangkauan penelitian adalah batasan waktu sampai dimana penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dan tertata sehingga dengan adanya jangkauan penelitian akan menambah batasan keabsahan data dan tidak terlampau jauh dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan (Priatna, 2017). Analisis dalam penelitian ini dibatasi waktu jangkauan ialah periode pemerintahan presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2019 dan 2019-2022. Selanjutnya jangkauan penelitian tersebut akan digunakan sebagai acuan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui latar belakang kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait pembangunan berkelanjutan terhadap perubahan iklim global selama pemerintahan Joko Widodo.

#### **1.9 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab pertama juga akan menjelaskan kerangka berpikir penulis dalam menjelaskan rumusan masalah, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang secara keseluruhan merupakan desain riset dari penelitian ini.

Bab II berisi penjelasan secara deskriptif implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan berfokus pada kebijakan dan upaya yang dilakukan Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo.

Bab III akan berisi analisis dan penjelasan Indonesia terhadap perlindungan iklim global dalam paradigma *middle power*. Lebih lanjut akan dibahas mengenai faktor-faktor yang termasuk dalam karakteristik *middle power diplomacy* yang diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta dilengkapi dengan rekomendasi dan keterbatasanpeneliti dalam melakukan studi.